

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip otonomi daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Sebagai daerah otonom, ia memiliki kekuatan dan tanggung jawab untuk mengejar kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Daerah berupaya mencapai otonomi daerah, sehingga daerah bebas mengatur tanpa perlu campur tangan pemerintah pusat. Sehingga daerah dapat leluasa menciptakan kemandiriannya sesuai potensi yang dimiliki daerah tersebut.

Kemampuan keuangan daerah dapat dijadikan sebagai ciri bahwa daerah tersebut sudah berotonomi. Dalam arti suatu daerah memiliki keleluasaan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat. Keuangan tersebut bisa digali, dikelola, dan digunakan oleh daerah tersebut untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya yang berkualitas dan baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintah daerah mengenai keuangan daerah yang berupa pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan itu semua merupakan bentuk dari asas otonomi. Karena daerah memiliki kewenangan dalam

menyelenggarakan pelayanan dan kesejahteraan rakyat didaerahnya daerah wajib memiliki keuangan sendiri.



Daerah sudah mandiri apabila dalam rangka membiayai kegiatan pemerintahannya untuk mewujudkan asas desentralisasi daerah menanggung sendiri. Karena seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah maka tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar.

Kabupaten Garut adalah salahsatu wilayah di Provinisi Jawa Barat dan mempunyai potensi sumber daya alam yang beraneka ragam yang dapat dinikmati keindahannya oleh setiap orang sehingga akan mampu untuk menggali potensi-potensi Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah yang tinggi dapat memberikan kontribusi yang tinggi pula terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Maka akan mengurangi tingkat ketergantungan Daerah terhadap Pemerintah Pusat. Sehingga Daerah disebut daerah yang sudah mandiri.

Namun berdasarkan data yang diperoleh peneliti tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Garut masih rendah. Seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 1 Kontribusi Komponen Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016-2018

NO	Uraian Pendapatan	Kontribusi Terhadap Realisasi Pendapatan Daerah			
		2016	2017	2018	Rata-Rata
1	Pendapatan Asli Daerah	10,28	15,65	9,79	11,88
2	Dana Perimbangan	65,89	60,12	61,04	61,93
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	23,84	24,23	29,16	26,18

(Sumber : Data LRA APBD Kabupaten Garut TA. 2016 s.d.. 2018)

Dari tabel tersebut terlihat bahwa rasio PAD terhadap Total Pendapatan selama tahun 2016-2018 secara rata-rata baru mencapai 11,88%, yang menggambarkan tingginya ketergantungan atau rendahnya kemandirian keuangan pemerintah Kabupate Garut karena masih bergantung kepada pihak diatasnya yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Daerah dikatakan mandiri apabila digabarkan dengan semakin besarnya angka rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan. Untuk memaksimalkan kemandirian keuangan daerah agar tingkat ketergantungan dari pusat dan daerah tidak teralalu mendominasi total pendapatan maka perlu adanya upaya memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah.

Tabel 1. 2 Skala Interval Pengukuran Tingkat Ketergantungan Daerah pada Pusat

No	Presentase PAD	Tingkat Ketergantungan Daerah
1	00,00-10,00	Sangat Tinggi
2	10,01-20,00	Tinggi
3	20,01-30,00	Cukup Tinggi
4	30,01-40,00	Sedang
5	40,01-50,00	Rendah
6	Lebih Dari 50	Sangat Rendah

(Sumber: Tim Penelitian dan Pengembangan Depdagri bekerjasama dengan Fispol UGM)

Tabel diatas merupakan tolak ukur untuk menentukan kemampuan keuangan daerah menurut tim penelitian dan pengembangan depdagri bekerja sama dengan Fispol UGM (dalam Bisma,2010) yang dikutip oleh Wempy, 2017. Sehingga dapat dilihat bahwa kemampuan keuangan Kabupaten Garut berada pada tingkat rendah yaitu 11,88%.

Kemandirian keuangan kabupaten Garut berada pada kriteria rendah, terlihat dari data Laporan Realisasi Anggaran bahwa target yang telah ditetapkan sebelumnya tidak pernah tercapai. Pada tahun 2018 anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan yang drastis yaitu dari 692.2555.365.083,00 menjadi 421.299.024.535,00.

Tabel 1.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016-2018

Tahun	Anggaran	Realisasi	Keterangan
2016	427.865.899.432,35	385.312.322.031,89	Tidak Tercapai
2017	714.955.896.619,17	692.255.365.083,00	Tidak Tercapai
2018	456.722.126.686,00	421.299.024.535,00	Tidak Tercapai

(Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Garut)

Hal tersebut menunjukkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Garut setiap tahunnya tidak mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya sehingga mempengaruhi terhadap tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat dan provinsi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti skripsi dengan judul **“Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Garut Periode Tahun Anggaran 2016-2018”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas peneliti menentukan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Rendahnya kontribusi Kabupaten Garut terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali sumber asli daerah.
3. Rendahnya kemandirian keuangan daerah Kabupaten Garut.
4. Pendapatan asli daerah yang mengalami penurunan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang di hadapi, yaitu :

1. Bagaimana kemandirian Keuangan Daerah Kabuapten Garut Periode Tahun Anggaran 2016-2018 Berdasarkan Derajat Desentralisasi ?

2. Bagaimana kemandirian keuangan daerah Kabupaten Garut periode tahun anggaran 2016-2018 berdasarkan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah ?
3. Bagaimana kemandirian keuangan daerah Kabupaten Garut periode tahun anggaran 2016-2018 berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ?
4. Bagaimana kemandirian keuangan daerah Kabupaten Garut periode tahun anggaran 2016-2018 Berdasarkan Derajat Kontribusi BUMD ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini harus mempunyai arah yang jelas. Tujuan penelitian yang merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hal yang diperoleh setelah penelitian. Maka tujuan dari penelitian ini yang sesuai dengan rumusan masalah adalah :

1. Untuk mengetahui analisis rasio keuangan daerah Kabupaten Garut berdasarkan derajat desentralisasi.
2. Untuk mengetahui analisis rasio keuangan daerah Kabupaten Garut berdasarkan rasio ketergantungan keuangan daerah.
3. Untuk mengetahui analisis rasio keuangan daerah Kabupaten Garut berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah.
4. Untuk mengetahui analisis rasio keuangan daerah Kabupaten Garut berdasarkan derajat kontribusi BUMD.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan bersifat teoritis maupun praktis, yakni sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan konsep atau teori-teori tentang administrasi keuangan negara khususnya terkait dengan keuangan daerah.

2. Kegunaan Praktis

Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan bahan masukan atau sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam menentukan kebijakan, dan strategi untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kinerja keuangan daerah.

- A. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan Ilmu Pengetahuan dan wawasan mengenai bagaimana kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Garut dengan menggunakan alat analisis yaitu berupa Analisis Rasio keuangan daerah.
- B. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai informasi tambahan yang berguna, serta sebagai bahan acuan ataupun referensi bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya, khususnya di bidang yang sama.

- C. Bagi Institusi pendidikan, dapat digunakan sebagai tambahan bahan referensi kepustakaan dalam rangka perluasan penelitian yang sejenis.

F. Kerangka Pemikiran

Mahmudi (2019:90), Analisis rasio keuangan merupakan suatu proses membandingkan beberapa data yang ada didalam bagian laporan keuangan. Analisis rasio berguna sebagai penginterpretasi perkembangan kinerja beberapa tahun periode dan bisa juga dibandingkan dengan kinerja keuangan lembaga lainnya yang sama jenisnya.

Halim (2014:15), Kemandirian keuangan daerah diartikan sebagai suatu daerah dapat membiayai sendiri kegiatan yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah tersebut dan dalam hal melayani masyarakat karena masyarakat telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan bagi suatu daerah.. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggung jawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi.

Analisis Rasio Keuangan Daerah, Mahmudi (2019:140-147)

1. Derajat Desentralisasi

Rumus menghitung derajat ini yakni dengan membandingkan jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio derajat

desentralisasi ini menghasilkan derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap seluruh penerimaan. Apabila pendapatan asli daerah menggambarkan tinggi maka penyelenggaraan desentralisasi daerah tersebut dapat dikatakan berhasil.

Rumusnya sebagai berikut :

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

$$2018 = \text{Derajat Desentralisasi} = \frac{421.299.024.535}{4.301.343.515.211} \times 100 \%$$

$$= 0,0979459146$$

$$2017 = \text{Derajat Desentralisasi} = \frac{692.252.365.083}{4.422.978.254.586} \times 100 \%$$

$$= 0,1565127218$$

$$2016 = \text{Derajat Desentralisasi} = \frac{385.312.223.032}{3.748.975.224.711} \times 100 \%$$

$$= 0,1027780126$$

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rumus untuk menghitung rasio ini yakni dengan membandingkan jumlah penerimaan transfer dengan seluruh pendapatan daerah. Apabila rasio ini setelah dihitung nilainya tinggi maka, daerah dapat dikatakan sebagai daerah yang masih bergantung.

Rumusnya sebagai berikut :

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100$$

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

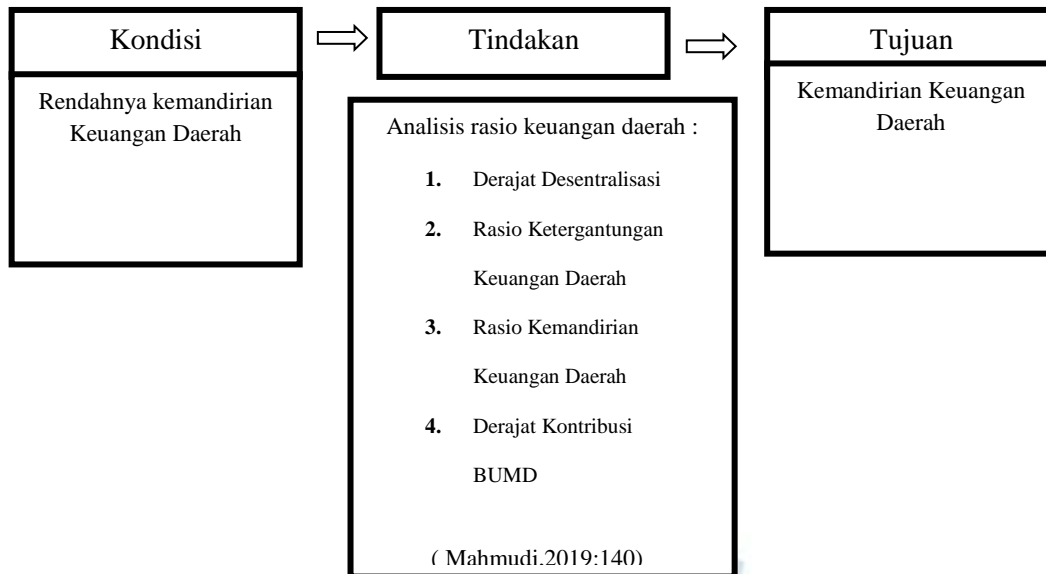
Untuk menghitung rasio ini yaitu dengan cara jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pusat dan provinsi juga pinjaman daerah dibandingkan jumlahnya. Apabila setelah dijumlahkan hasilnya tinggi maka daerah bisa disebut sebagai daerah yang mandiri. Rumusnya sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100 \%$$

4. Derajat Kontribusi BUMD

Rasio ini dapat dijadikan acuan untuk melihat bagaimana partisipasi badan usaha disuatu daerah dalam rangka berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Cara menghitungnya yakni dibandingkan Antara pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah dan dipisahkan dengan pendapatan asli daerah.

$$\text{Derajat Kontribusi BUMD} = \frac{\text{Penerimaan Bagian Laba BUMD}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 1. 4 Kerangka Pemikiran

G. Proporsisi

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas peneliti menyusun proposisi sebagai berikut : “Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Garut Pada Periode Tahun Anggaran 2016-2018 akan lebih baik jika sesuai dengan Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Dan Derajat Kontribusi yang dapat dijadikan indikator”.

